

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Padang dimulai pada Tahun 2013.

Melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 dibentuklah suatu unit pelaksana pendidikan khusus (UPT PKLK) di Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan dan pengawasan. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukannya dimulai dari : pengawasan dari penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, pengawasan mengenai sumber daya manusia yang terampil dalam mendukung pendidikan inklusif, serta pengawasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan melalui UPT PKLK akan melakukan monitoring atau pemantauan di tiap sekolah dari penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Padang, apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian pihak sekolah akan diberikan teguran dan serta sanksi administratif/pidana.

2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang dari penyelenggaraan inklusif, kurangnya pemahaman dan kompetensi guru/guru pembimbing dan belum terbentuknya suatu sistem kurikulum Standar Nasional hingga minimnya bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif mengakibatkan belum terlaksananya pendidikan inklusif dengan maksimal.

## B. Saran

Bedasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan Kota Padang khususnya di UPT PKLK dan di Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang.

1. Di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan adanya suatu koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak dari penyelenggaran pendidikan inklusif yaitu Pihak Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang dengan pihak Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dengan koordinasi yang baik akan menciptakan suatu hubungan timbal balik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Padang sehingga kedepannya nanti tidak kita temukan lagi kendala dari kurang maksimalnya dari penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut.
2. Kepada Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang diharapkan mengadakan beberapa kegiatan dalam pelatihan-pelatihan dan lokakarya bagi guru-guru pembimbing/pendamping khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang nantinya diharapkan guru-guru pembimbing/pendamping dari peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai kompetensi lebih dalam menangani setiap anak peserta berkebutuhan khusus di mana mereka ditempatkan/bertugas. Yang menjadi fokus dari Dinas Pendidikan Kota Padang khususnya UPT PKLK adalah pengawasan yang dilakukan masih kurang maksimal. Menurut peraturan UPT PKLK mempunyai tanggungjawab dalam proses pengawasan. Setiap tindakan yang dilakukan/dilaksanakan harus ada pengawasannya karena

didalam pengawasan tidak hanya mencari kesalahan atau hambatannya saja akan tetapi mempunyai makna untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Diharapkan kedepannya UPT PKLK melakukan pengawasan yang jauh lebih baik lagi dalam melakukan memonitoring dari semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Padang.

3. Kepada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang diharapkan untuk menambah guru pembimbing/pendamping khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena di Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang ditahun pelajaran 2014/2015 dijadikan tempat favorit dalam penerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan beberapa kategori, hal ini tidak sebanding dengan 1 orang guru pembimbing atau pendamping khusus, nantinya hal yang ditakutkan dari guru pembimbing/pendamping yaitu tidak terhendelnya semua peserta didik berkebutuhan khusus apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang tiba-tiba terjadi. Tidak hanya itu pihak sekolah harus memperhatikan sarana dan prasarana untuk peserta didik berkebutuhan khusus tersebut, karena berhasil atau tidak berhasilnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dilihat dari salah satu faktor yaitu pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah dari penyelenggara pendidikan inklusif tersebut.